



PRIORITAS KEBIJAKAN ENERGI INDONESIA & KANDIDAT MENTERI ESDM

APRIL 2019

COMMUNICATIONS AND OUTREACH DEPARTMENT

Pendapat responden dari mayoritas profesional dan pelaku usaha pada sektor energi

DAFTAR ISI

Konteks

Pendahuluan

Temuan Utama

Analisa:

1. Evaluasi Kebijakan Sektor Energi (Kementerian ESDM) di Pemerintahan Jokowi - JK
2. Kriteria Penting & Kandidat Menteri ESDM
3. Prioritas Kebijakan Energi Indonesia bagi Pemerintahan 2019 - 2024

Metodologi dan Hasil Survei

Referensi

Hak Cipta

Tentang IESR





IESR

Accelerating Low Carbon Energy Transition

ENERGY TRANSFORMATION | SUSTAINABLE ENERGY ACCESS | GREEN ECONOMY

KATA PENGANTAR

Jajak pendapat “Prioritas Kebijakan Energi Indonesia dan Kandidat Menteri ESDM” dilakukan dalam rangka menjaring pandangan publik terhadap prioritas-prioritas di sektor energi dan sosok calon Menteri ESDM di periode kabinet berikutnya. Hasil yang disajikan di sini merupakan sebuah potret cepat (snapshot) persepsi masyarakat dan pelaku usaha di bidang energi.

Hasil ini tentunya tidak sempurna, mengingat metode yang dipakai sangat sederhana. Tetapi bagi kami respon yang diberikan oleh para responden yang terekam menjadi materi berharga untuk menilai dan menganalisa kecenderungan evaluasi publik dan pelaku usaha terhadap kinerja sektor ESDM, kriteria dari Menteri ESDM, dan potensi kandidat Menteri ESDM.

Kami berharap hasil dari jajak pendapat ini dapat menjadi masukan bagi Presiden R.I. 2019-2024 dalam merumuskan arah kebijakan dan program-program kunci sektor energi Indonesia dan juga dalam memilih Menteri ESDM yang membantu Presiden di kemudian hari.

Jakarta, 5 Mei 2019

Fabby Tumiwa
Direktur Eksekutif IESR



LATAR BELAKANG

1. Terselenggaranya Pemilihan Umum Raya Presiden - Wakil Presiden RI yang akan diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei 2019
2. Periode Kepemimpinan Joko Widodo - Jusuf Kalla akan berakhir pada Oktober 2019 dan akan dilanjutkan oleh pemenang Pemilu 2019
3. Kabinet 2019-2024 yang akan dibentuk
4. Perlu adanya evaluasi terhadap hasil kerja 4,5 tahun di sektor ESDM

Tujuan dari Jajak Pendapat ini adalah:

1. Mengetahui persepsi masyarakat atas kebijakan pemerintah era Jokowi - JK di bawah Kementerian ESDM pada sektor energi
2. Sebagai masukan bagi pemerintahan selanjutnya dalam penyusunan kebijakan energi selama lima tahun mendatang serta pemilihan menteri ESDM.



Ringkasan: Temuan Utama dari Polling



KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BAWAH KEMENTERIAN ESDM TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI

Mayoritas responden menyatakan tidak puas (51,3%) terhadap prioritas pemerintah di sektor energi

BELUM ADA SOSOK DOMINAN

Belum ada sosok yang diyakini memiliki visi jangka panjang dan kemampuan untuk mengelola sektor energi di Indonesia. Suara responden dalam mengusulkan nama calon menteri ESDM tersebar pada semua nama yang diusulkan. Mayoritas responden mengusulkan nama selain menteri dan wakil menteri ESDM petahana. Tidak ada 1 nama calon yang unggul secara mencolok dibanding nama-nama lain.

DISPARITAS EVALUASI PADA KEBIJAKAN POPULIS DAN NON-POPULIS

Terdapat perbedaan yang sangat tajam dari pendapat responden; kebijakan populis (bersinggungan langsung pada konsumen publik) lebih mendapat apresiasi di banding kebijakan pemerintah yang non-populis (industri, tidak berdampak langsung pada konsumen)

ENERGI TERBARUKAN MENJADI PRIORITAS UTAMA DALAM KEBIJAKAN ENERGI INDONESIA

Hampir 70% responden menginginkan adanya bauran energi terbarukan mencapai 23% di tahun 2025 dalam prioritas kebijakan energi Indonesia

EVALUASI KEBIJAKAN SEKTOR ENERGI

Responden dari Jajak Pendapat ini memiliki pengetahuan yang memadai dalam isu - isu sektor energi (pre-exposed)

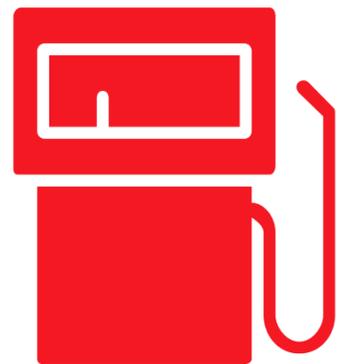
01



PRE-EXPOSED RESPONDENT WITH RENEWABLE ENERGY ISSUE



- Sebanyak 31,6% responden merupakan profesional yang bekerja di sektor energi dan 13,2% merupakan pelaku usaha di bidang energi. Secara demografis, mayoritas responden berasal dari kalangan usia dewasa, yaitu 30 - 40 tahun dan di atas 50 tahun.
- Dari pertanyaan yang diajukan di dalam Jajak Pendapat ini, isu - isu energi yang bersinggungan langsung dengan konsumen, seperti keterjangkauan harga BBM dan tarif listrik serta rasio elektrifikasi di Indonesia, mendapat apresiasi yang positif dari responden dengan penilaian Baik/Sangat Baik.
- Di sisi lain, isu-isu yang berkaitan dengan industri atau tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat konsumen, kurang diapresiasi oleh responden. Responden beranggapan kebijakan pemerintah dalam memenuhi kualitas kondisi pendukung (enabling environment) untuk menarik investor di sektor energi cenderung menurun selama 4,5 tahun belakangan.
- Secara umum responden memberikan penilaian Tidak Puas pada prioritas kebijakan energi di Indonesia di era Jokowi - JK, sehingga dibutuhkan evaluasi secara menyeluruh dalam menyusun prioritas kebijakan energi Indonesia di masa mendatang.



Menurut anda, bagaimana kualitas penyediaan dan pelayanan di bidang BBM dan LPG bagi publik di era Jokowi-JK?



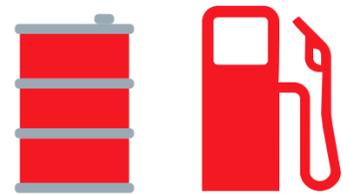
Menurut anda, bagaimana kualitas penyediaan dan pelayanan ketenagalistrikan bagi publik di era Jokowi - JK?



Menurut anda, bagaimana keterjangkauan harga energi (BBM, LPG, Listrik) oleh konsumen pengguna?



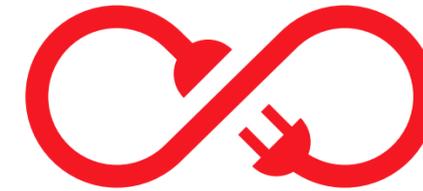
Menurut anda, bagaimana kualitas kondisi pendukung (enabling environment) a.l. kebijakan, perangkat aturan, dan tata kelola untuk menarik investasi di sektor:



MIGAS



Ketenagalistrikan



Energi Terbarukan



Minerba

Meningkat	36,8%	41,4%	34,9%	38,3%
Menurun	40,1%	41,4%	52%	34%
Tidak Tahu	23%	17,1%	13,2%	27,7%





Sangat Puas



Puas



Tidak Puas



Tidak Tahu

**SECARA UMUM,
TINGKAT
KEPUASAN ANDA
TERHADAP KINERJA
KEMENTERIAN
ESDM DI ERA
PEMERINTAHAN
JOKOWI-JK**



KRITERIA DAN KANDIDAT MENTERI ESDM

Responden di harapkan memilih paling tidak 3 dari 8 kriteria penting bagi Menteri ESDM di kabinet mendatang

02

VISI UNTUK MEWUJUDKAN ENERGI YANG BERKELANJUTAN

- Responden menempatkan **visi jangka panjang untuk mewujudkan energi yang berkelanjutan dan aman, dan memberi nilai tambah pada ekonomi domestik** sebagai kriteria terpenting bagi kandidat menteri ESDM di pemerintahan selanjutnya, dengan **69,1%** suara.
- **Meritokrasi** menjadi pilihan kedua untuk kriteria penting menteri ESDM. Dengan memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang energi (sebagai profesional/pembuat kebijakan/pelaku usaha), responden menganggap sosok tersebut mampu memimpin arah kebijakan sektor energi Indonesia
- **Sosok berintegritas, memiliki reputasi bersih, dan dapat dipercaya** juga sangat diharapkan responden
- Terdapat 27 nama yang disusun oleh IESR berdasarkan riset pendahuluan, dan dalam Jajak Pendapat responden berhak mengusulkan nama lain pada kolom yang tersedia untuk dipilih sebagai calon menteri yang diusulkan.
- Disebutkan **9 nama tambahan** dari usulan responden sehingga terkumpul total **36 nama** di akhir Jajak Pendapat dengan distribusi suara secara merata, masing - masing nama paling tidak mendapat 1 suara dari total 152 keseluruhan responden
- **Tidak ada 1 nama pun dari 36 kandidat yang diusulkan yang mendominasi**, atau paling tidak menembus angka 30% pilihan responden.
- Meskipun nama - nama tokoh petahana atau pernah menjabat di jajaran kementerian menduduki posisi utama jika diurutkan dalam ranking, mayoritas responden (lebih dari 50%) mengusulkan nama lain selain petahana.
- Hal ini menunjukkan **tidak adanya sosok yang mendominasi** yang dianggap sebagai figur kuat sesuai kriteria - kriteria yang dipilih responden.
- Bahkan **sosok yang saat ini berperan di Kementerian ESDM hanya mendapatkan 9,2%** suara dari mayoritas responden merupakan profesional yang bekerja di sektor energi (31,6%) dan pelaku usaha di sektor energi (13,2%).





9,2%

Archandra Tahar

14 Suara



8,6%

Ignatius Jonan

13 Suara



7,9%

Widhyawan Prawiratmadja

12 Suara

Dari 152
Suara

■ Kandidat yang diusulkan Publik
■ Kandidat yang diusulkan oleh IESR

Faisal Basri
Sudirman Said

9 Suara

Andang Bachtiar
Andi N Sommeng
Hilmi Panigoro
Satya Widya Yudha
Suryadarma

4 Suara

Nieke Widyawati
Ridwan Djamaluddin
Sri Mulyani Indrawati
Tri Mumpuni

6 Suara

Bambang Brodjonegoro
Darmawan Prasodjo
Eri Riyana Hardjapamekas
Fabby Tumiwa
Luky Yusgiantoro

3 Suara

Deendarlianto
Evita Legowo
Hardiv Situmeang

5 Suara

Abadi Poernomo
Dahlan Iskan
Dwi Soetjipto
Herman Darnel Ibrahim
Irwandy Arif
Rida Mulyana

2 Suara

Budi Gunadi Sadikin
Errie Sudarmo
Fahmy Radhi
Luluk Sumiarso
Prof. Mukhtasor
Ricky Elson
Sonny Keraf
Suzanty Sitorus
1 Suara

PRIORITAS KEBIJAKAN ENERGI INDONESIA BAGI PEMERINTAHAN 2019 -2024

67,8% responden menempatkan meningkatkan bauran energi terbarukan mencapai 23% di 2025 (BBM dan Tenaga Listrik) sebagai prioritas utama

03

TRANSISI ENERGI



- Responden meyakini bahwa pemerintahan selanjutnya selayaknya menjadikan **energi terbarukan sebagai prioritas utama** dalam arah kebijakan sektor energi Indonesia
- Selaras dengan harapan tersebut, responden sadar bahwa untuk mencapai bauran energi terbarukan 23% pada 2025, diperlukan adanya usaha pemerintah yang signifikan dalam memperbaiki: **iklim investasi di sektor minyak, gas dan ketenagalistrikan** (44,7% suara responden) dan **tata kelola pertambangan MINERBA** (Clean and Clear, penegakan hukum, reklamasi pascatambang, dsb) yang dianggap kurang dalam kebijakan saat ini (39,5% suara responden);
- **Pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca** dari pembangkit listrik tenaga fosil; dan tetap memenuhi **akses kelistrikan hingga 100%** di seluruh Indonesia juga diharapkan responden sebagai prioritas.
- Untuk mendukung prioritas di atas, 27% responden juga menganggap bahwa **restrukturisasi PLN sebagai BUMN** yang berperan penting dalam membantu pemerintah dalam memenuhi kebijakan tersebut juga penting untuk dikedepankan.



MENURUT ANDA, APA SAJA HAL-HAL YANG PERLU MENJADI PRIORITAS PEMERINTAH DALAM PERIODE 5 TAHUN MENDATANG UNTUK SEKTOR ENERGI

67.8%

Meningkatkan bauran energi terbarukan mencapai 23% (BBM dan Pembangkitan Listrik)

39.5%

Memperbaiki tata kelola pertambangan MINERBA (clean and clear, penegakan hukum, reklamasi paska tambang, dsb)

44.7%

Memperbaiki iklim investasi di sektor Minyak, Gas dan Ketenagalistrikan

33.6%

- Mengendalikan dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari pembangkit listrik tenaga fosil (PLTU, PLT Gas, PLT Diesel/BBM).
- Menyediaan akses kelistrikan hingga 100% di seluruh Indonesia

27%

Restrukturisasi PLN

CATATAN AKHIR

1

Responden sepakat bahwa arah kebijakan sektor energi Indonesia harus memperhatikan energi terbarukan sebagai prioritas

2

Menyarankan pemerintah selanjutnya untuk dengan seksama menempatkan sosok strategis di sektor energi yang dapat memperbaiki arah kebijakan di kementerian ESDM



METODOLOGI DAN HASIL SURVEI

Metodologi: Jajak Pendapat ini dilaksanakan secara daring dengan menyusun sejumlah pertanyaan tertulis dan disusun secara kronologis. Surat elektronik kemudian dikirimkan kepada pelanggan IESR yang dengan sukarela mendaftarkan diri melalui laman resmi IESR dengan menyediakan tautan umum untuk mengumpulkan data yang ditanyakan. Tautan juga disebarakan melalui kanal media sosial resmi IESR dengan responden acak. Jajak Pendapat dibuka untuk umum dalam jangka waktu terbatas, dimulai sejak satu hari setelah Pemilu Pilpres 2019 (17 April 2019) dan diakhiri pada tanggal 25 April 2019. Terdapat 152 responden terekam yang mayoritas berdomisili di Indonesia dan beberapa di luar negeri.

31,6% responden merupakan profesional yang bekerja di sektor energi

21,7% responden mengidentifikasi dirinya bekerja di sektor lain dari pilihan yang tersedia

13,2% responden berasal dari kalangan pengusaha di bidang energi

Berusia rata - rata 30 - 40 tahun - 30,3%

Berusia rata - rata 25 - 29 tahun - 21,7%

Berusia rata - rata di atas 50 tahun - 20,4%

45,3% dari responden berdomisili di DKI Jakarta, dengan keterwakilan responden dari luar Pulau Jawa yang merata (Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) & luar negeri (Taipei, Seoul, Kuala Lumpur, Sheffield)



Hak Cipta



- Hasil kerja ini berlisensi dibawah Kategori Lisensi Creative Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0
- Anda diperbolehkan untuk:
 - Menyalin, mendistribusikan, menunjukkan dan memaparkan hasil kerja ini
 - Menjadikan karya turunan (Derivative works)
- Dengan kondisi sebagai berikut:
 - Anda diharuskan mengaitkan hasil kerja dengan cara yang ditentukan oleh penulis atau pemberi lisensi
 - Anda tidak diperkenankan untuk menggunakan hasil kerja ini untuk kepentingan komersial
 - Jika anda hendak mengubah, memperbaiki, atau membangun narasi baru dari hasil kerja ini, anda diperbolehkan untuk membagikannya secara umum dengan lisensi identik dari hasil karya ini
- Gunakan/jelaskan ketentuan lisensi dari karya ini, jika anda hendak menggunakan atau mendistribusikannya
- Aturan ini dapat di bebaskan jika anda mendapat ijin dari penerbit karya ini.
- Peraturan di atas tidak diperlukan jika Penggunaan hasil karya ini digunakan secara adil dan sesuai dengan hak

TENTANG IESR

www.iesr.or.id



Institute for Essential Services Reform adalah institusi riset dan advokasi di bidang energi dan kebijakan lingkungan. Institusi kami mengkombinasikan studi mendalam, menganalisa kebijakan, undang - undang, dan aspek tekno-ekonomi pada sektor energi dan lingkungan dengan aktifitas advokasi kepentingan umum yang kuat untuk mempengaruhi perubahan kebijakan pada skala Nasional, sub-bangsa dan dunia. Untuk Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi laman www.iesr.or.id atau ikuti Facebook dan Twitter kami.